

## PERAN MEDIASI IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL TERHADAP EFEKTIFITAS IKLIM KOMUNIKASI DAN KINERJA SIPKD

**Asrini<sup>1\*</sup>**

Faculty of Economic and Business, Muhammadiyah Jambi University, Jambi, Indonesia. Email: email:  
email: [asrini.msa@umjambi.ac.id](mailto:asrini.msa@umjambi.ac.id)

**Musnaini<sup>2</sup>**

Faculty of Economic and Business, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia  
email: [musnaini@unja.ac.id](mailto:musnaini@unja.ac.id);

**Wita Juwita Ermawati<sup>3</sup>**

Faculty of Economic and Management, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia  
email: [witaman@apps.ipb.ac.id](mailto:witaman@apps.ipb.ac.id)

**Khaira Amalia Fachrudin<sup>4</sup>**

Faculty of Economics and Business, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
email: [khaira@usu.ac.id](mailto:khaira@usu.ac.id)

**Juanda<sup>5</sup>**

Faculty of Economic and Business, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia.  
email: [juanda1@usk.ac.id](mailto:juanda1@usk.ac.id)

**Conchita Valentina Latupapua<sup>6</sup>**

Faculty of Economic and Business, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.  
email: [connycvl.mgtup@gmail.com](mailto:connycvl.mgtup@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran implementasi SAP berbasis akrual memediasi pengaruh anteseden iklim komunikasi terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara langsung dan tidak langsung. Desain penelitian menggunakan metode *explanation reseach* yang bersifat kuantitatif. Populasi 140 entitas dari 10 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), teknik sampling *purposive* dengan kriteria responden memahami dan menggunakan SAP berbasis akrual, dan SIPKD lebih dari 2 tahun. Ada 100 pegawai bagian perencanaan dan keuangan sebagai responden yang mengisi lengkap dan mengembalikan kuisioner. Data dianalisa menggunakan *Path Least Square* dan alat analisisnya *software SMARTPLS*. Hasil empiris membuktikan bahwa secara langsung iklim mempengaruhi Kinerja SIPKD sebesar 16%, sementara secara tidak langsung sebesar 61,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa efektifitas iklim komunikasi berkontribusi secara langsung lebih rendah daripada apabila melalui mediasi. Artinya, peran mediasi menjadi kunci untuk kinerja SIPKD di pemerintah daerah. Setiap OPD wajib mengkomunikasikan secara detail, jelas dan terbuka terkait implementasi SAP berbasis akrual. Efektifitas iklim komunikasi terbukti apabila Staf sebagai pengguna SAP dan SIPKD memiliki persamaan persepsi dan instruksi terbuka akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya membuat laporan pengelolaan keuangan sesuai prosedur SAP dan SIPKD yang dikomunikasikan. Implikasi penelitian membangun model iklim komunikasi yang terbuka, responsive dan adaptif sebagai budaya organisasi. Saran bagi OPD kegiatan workshop, pelatihan, atau Focus Group Discussion untuk mengkomunikasikan persamaan persepsi terkait implementasi SAP berbasis akrual dan Kinerja SIPKD secara rutin. Kuatkan budaya iklim komunikasi. Dapat mengembann hipotesis pengaruh simultan iklim komunikasi, gaya kepemimpinan dan implementasi SAP berbasis akrual mempengaruhi kinerja SIPKD.

**Kata Kunci:** Iklim Komunikasi; SAP Berbasis Akrua; Kinerja SIPKD

### **ABSTRACT**

*This study aims to explain the role of accrual-based SAP implementation in mediating the influence of communication climate antecedents on Regional Financial Management Information System (SIPKD) performance directly and indirectly. The research design uses a quantitative explanation research method. Population 140 entities from 10 Local Government Organizations, purposive sampling technique with the criteria that respondents understand and use accrual-based SAP, and SIPKD for more than 2 years. There were 100 planning and finance employees as respondents who filled in completely and returned the questionnaire. Data is analyzed using Path Least Square and SMARTPLS software analysis tools. Empirical results prove that climate directly affects SIPKD performance by 16%, while indirectly by 61.5%. This finding shows that the effectiveness of the communication climate contributes directly lower than when through mediation. This means that the role of mediation is key to SIPKD performance in local government. Each OPD must communicate in detail, clearly and openly regarding the implementation of SAP accrual-based. The effectiveness of the communication climate is proven if the staff as SAP and SIPKD users have similar perceptions and open instructions will carry out their duties and responsibilities to make financial management reports according to the communicated SAP and SIPKD procedures. The implications of the research build an open, responsive and adaptive communication climate model as an organizational culture. Suggestions for OPD workshop activities, training, or Focus Group Discussions to communicate similar perceptions related to accrual-based SAP implementation and SIPKD Performance regularly. strengthen the culture of the communication climate. can develop hypotheses on the simultaneous influence of communication climate, leadership style and implementation SAP accrual-based toward SIPKD performance.*

**Keywords:** *Communication Climate; Accrual-Based SAP; SIPKD Performance*

## **I. PENDAHULUAN**

Urgensi pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah kebijakan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bersih terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Penetapan SAP berbasis akrua yang harus digunakan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia tertuang pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua dan PP No. 12 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Menurut beberapa kajian ilmiah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut tujuan implementasi SAP berbasis akrua dan SIPKD yaitu (1) Peningkatan Transparansi (Adriana & Ritonga, 2018; Agustin & Arza, 2020). (2) Peningkatan Akuntabilitas penggunaan dana publik menggunakan SIPKD (Agustin & Arza, 2020; Azizah & Hidayat, 2023). (3) Efisiensi Operasional, membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan (Budiman & Arza, 2013; N & L, 2021). (4) Pengendalian Keuangan, kinerja SIPKD yang baik juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan keuangan daerah dengan lebih baik, termasuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana atau penyelewengan (Hasan, Setiawan, & Cahyono, 2022; Hermawansyah, Aditya, & Susi, 2022). (5) Kemampuan Perencanaan, meliputi perencanaan, alokasi pendanaan untuk program pemerintah dan masyarakat, kegiatan *monitoring* dan evaluasi keuangan yang akurat dan terkini terinformasikan kepada *shareholder* maupun *stockholder* (Subhi & Yuhertiana, 2021; Wulandari, Nugroho, & Ambarriani, 2017; Yuniarta & Purnamawati2, 2020).

Namun, sampai saat ini fenomena menunjukkan bagi setiap pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dan kinerja SIPKD belumlah sempurna, masih ditemukan hambatan dan kesulitan. Terkait implementasi SAP akrual dan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih mengalami kendala terkait proses pelaporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak tepat waktu, masih terdapat temuan BPK yang tidak konsisten dengan standar SAP akrual sehingga masih ada entitas pemerintah yang tidak memenuhi opini publik Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Maulana, 2016; Dollah & Manossoh, 2017; Suryaningrat & Utama, 2018). Sehingga beberapa penelitian terdahulu berupaya mencari sebab dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Beberapa temuan empiris mengemukakan bahwa Iklim komunikasi mempengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual dan evaluasi kinerja suatu system informasi pengelolaan keuangan daerah. Iklim komunikasi menjadi kunci utama, komunikasi yang terbangun untuk menyampaikan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan menggunakan anggaran negara harus sesuai dengan SAP berbasis akrual dan SIPKD. Sehingga pemerintah Pusat dapat memastikan pelaksanaan SAP berbasis akrual benar terlaksana dan kinerja system informasi pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat yang diharapkan dan memperbaiki ketidaksempurnaan yang mungkin ada (Aswar, 2020; Dewi, Azam, & Yusoff., 2019; Fatah & Wibowo, 2022). Tetapi ada juga temuan yang mengemukakan bahwa iklim komunikasi tidak mempengaruhi kinerja SIPKD, karena system informasi tersebut merupakan bentuk dari kerja yang sudah terbentuk, artinya walau tanpa adanya komunikasi yang efektif kedua hal ini akan tetap dilaksanakan, sehingga perlu variabel mediasi yang bisa menjadi evaluasi untuk mengungkap pengaruh iklim komunikasi yang efektif tersebut (Azizah & Hidayat, 2023). Pengembangan model hipotesis oleh (Cockburn, Cundill, & Shackleton, 2019) menggunakan SAP berbasis akrual memediasi regulasi, iklim komunikasi dan pengendalian internal terhadap kinerja system informasi keuangan daerah. Tetapi terkait iklim komunikasi masih belum dijelaskan oleh teori kontinjensi karena tidak menjelaskan keefektifan iklim komunikasi, walaupun penelitian tersebut membuktikan peran mediasi tersebut sangat besar dalam evaluasi struktur model.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus membahas efektifitas iklim komunikasi, SAP berbasis akrual dan Kinerja SIPKD. Maka rumusan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung efektifitas Iklim Komunikasi terhadap Kinerja SIPKD melalui Implementasi SAP berbasis akrual. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan peran mediasi Implementasi SAP berbasis akrual antara Efektifitas Iklim Komunikasi dengan Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan perspektif teori *stewardship*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengembangkan model menggunakan teori keperilakuan akuntansi dengan perspektif teori *stewardship*, komunikasi dan system informasi keuangan. Berikut uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)**

Konsep *Stewardship Theory* dirancang khusus untuk memberikan gambaran psikologi dan sosiologi para manajerial untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah. Teori *Stewardship* dapat

berfungsi sebagai mekanisme pertanggung jawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi dan *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab (Jefri, 2018). Penerapan teori *stewardship* ini mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang pemerintahan yang sedang laksanakan dalam *grand design*-nya memiliki tujuan akhir birokrasi yang bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima. Pencapaian reformasi birokrasi ini merupakan pelaksanaan *good governance* yang diharapkan dapat tercipta di setiap perusahaan ataupun organisasi yang memiliki ciri *going concern* (Jefri, 2018b).

Teori *Stewardship* merupakan kerangka teori yang berfokus pada hubungan antara manajer dan pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajer bertindak sebagai pelayan yang termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingannya (Chrisman, 2019). Menurut teori *Stewardship*, manajer memiliki orientasi kolektif dan didorong oleh kepentingan non-finansial seperti reputasi dan pertimbangan etika (Velte, 2020). Teori *Stewardship* menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif (Hasanah & Amal, 2020; Chrisman, 2019; Cockburn, Cundill, & Shackleton, 2019)

### **Sistem Akuntansi Pemerintah-Berbasis Akrua**

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Penerapan SAP ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparat yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah berserta instansi-instansi yang terkait di dalamnya (Dollah & Manossoh, 2017; Hasanah & Amal, 2020). Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yang diharapkan dapat membantu penerapan SAP berbasis akrua (BPK, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, 2023).

### **Konsep Efektivitas Iklim komunikasi**

Realita organisasi, dikemukakan fakta empirik keberhasilan dan hambatan implementasi sistem organisasi yang disebabkan tingkat efektivitas iklim komunikasi (Yulianti, 2009). Keefektifan iklim komunikasi dapat dijelaskan dalam kaitan dengan pemenuhan fungsi iklim komunikasi ini secara terbuka dalam organisasi untuk pemberdayaan dan keterlibatan anggota organisasi mencapai tujuan. Iklim komunikasi memerlukan syarat semua anggota organisasi memiliki kompetensi pada tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dilakukan iklim komunikasi secara efektif.

Meningkatkan efektivitas iklim komunikasi dengan pemangku kepentingan (*Internal Process/IP 1*). Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli, agar iklim komunikasi yang dibangun lebih efektif (Rachmawati, Hurriyati, & Dewi Dirgantari, 2020; Subhi & Yuhertiana, 2021)

### III. METODE PENELITIAN

#### Desain penelitian

Rancangan penelitian *non experimental* ini mengemukakan rancangan kuantitatif yang bersifat studi survei penjelasan (*explanatory research*, dengan pendekatan kuantitatif bersifat *pre-determined*). Desain penelitian eksplanasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kerangka konseptual dan teori, sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat menjelaskan kontribusi antara variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Teknik penelitian kuantitatif sering digunakan dalam penelitian eksplanasi, dimana pengumpulan data dilakukan melalui instrumen berupa angket atau kuesioner yang kemudian dianalisis secara statistik. Metode ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta menjelaskan pengaruh kausal antara keduanya melalui pengujian hipotesis (Suharyadi. & Purwanto., 2007). Dengan demikian, desain penelitian eksplanasi dan teknik penelitian kuantitatif sangat relevan dalam konteks penelitian ilmiah ini.

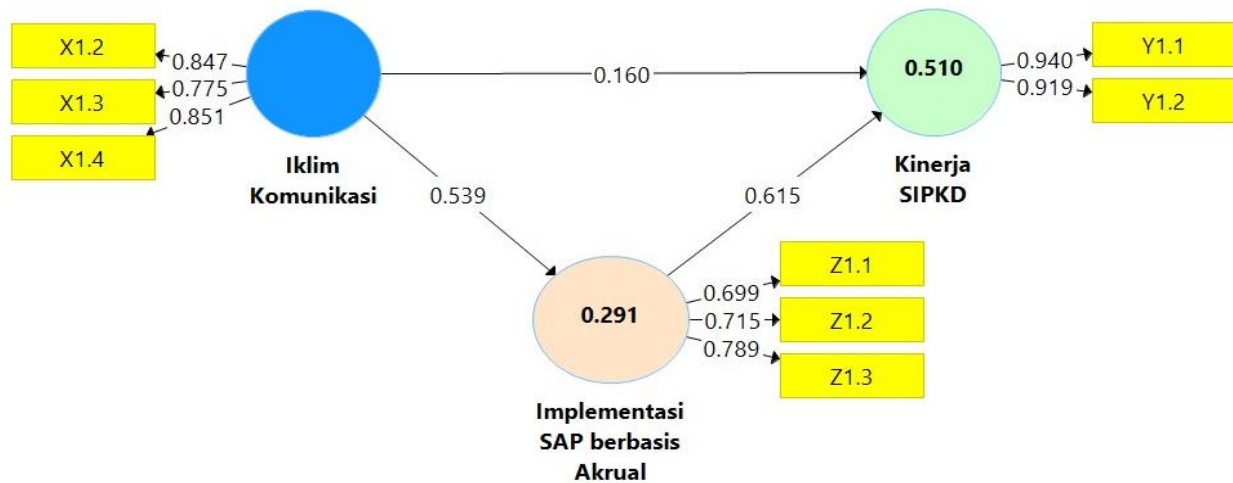
#### Teknik Sampling dan Analisis data

Analisis data statistik serta interpretasi data statistik. Tujuan desain penelitian ini untuk Menganalisis dan menjelaskan hubungan *causality* antar variabel melalui menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis (*hypotheses testing*) yang spesifik dan konklusif (Malhotra, 1999; Cresweel, 2010). Penelitian memiliki populasi sebanyak 140 pegawai bagian perencanaan dan keuangan dari 10 entitas Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Penarikan sampel dengan *purposive* dengan kriteria khusus terkait pengalaman menggunakan SAP berbasis akrual dan Ssistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan Jumlah resposnden sepuluh 100 orang, yang mengisi dan mengembalikan kusioner sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Obyek penelitian ini yaitu variabel eksogen (fektitifitas Iklim Komunikasi/X), Variabel intervening mediasi (Implementasi SAP berbasis akrual (Z) dan Veriabel endogen (Kinerja SIPKD/Y). Kerangka kerja model penelitian yaitu Pengaruh langsung X terhadap Z dan Y, Pengaruh Z terhadap Y, Pengaruh X terhadap Y dimediasi Z. Teknik analisis menggunakan *Path Least Square*, Analisa data *Software SMartPLS*.

#### IV. HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

##### Hasil Analisa Data



Gambar 1. Model Hipotesis-PLS Algoritma

##### Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis bahwa (H1) Iklim komunikasi secara langsung mempengaruhi Kinerja SIPKD. (H2) Efektifitas Iklim komunikasi secara langsung mempengaruhi Implementasi SAP berbasis akrual. (H3) Implementasi SAP berbasis akrual secara langsung mempengaruhi Kinerja SIPKD, (H4) Iklim komunikasi melalui Implementasi SAP berbasis akrual mempengaruhi Kinerja SIPKD. Berikut hasil analisa hipotesis penelitian ini.

##### Hasil Analisa SEM- PLS-Algorithm

Tabel 1. Signifikansi- Path Coefficients

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
<b>Iklim Komunikasi - &gt; Implementasi SAP berbasis Akrual</b>	0,539	0,548	0,081	6,683	<b>0,000</b>	<b>Significan+ (diterima)</b>
<b>Iklim Komunikasi - &gt; Kinerja SIPKD</b>	0,160	0,160	0,115	1,394	<b>0,164</b>	<b>Mediasi Penuh</b>
<b>Implementasi SAP berbasis Akrual -&gt; Kinerja SIPKD</b>	0,615	0,615	0,083	7,421	<b>0,000</b>	<b>Significan+ diterima</b>

Sumber: Data primer (2023)

## Hasil Analisa SEM- PLS-Bootstrapping

**Tabel 2. Specific Indirect Effects**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Keputusan
<b>Iklm Komunikasi -&gt; Implementasi SAP berbasis Akrual -&gt; Kinerja SIPKD</b>	0,332	0,335	0,057	5,841	<b>0,000</b>	<b>Terbukti Mediasi Penuh</b>

Sumber: Data primer (2023)

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Langsung Iklim Komunikasi (X) Terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).**

Berdasarkan hasil perhitungan *Bootstrapping uji direct effects* pada tabel 1 menunjukkan nilai *P-Value*  $X \rightarrow Y$  sebesar 0,164 dan hubungan 0,160 (H1-tidak terbukti dan diterima). Artinya bahwa efektivitas iklim komunikasi tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,164 terhadap Kinerja SIPKD sebesar 16,4%, ketidaksignifikannya positif. Artinya jika implementasi dilaksanakan tanpa di komunikasikan sebelumnya maka akan efektifitas iklim komunikasi tidak terbukti mempengaruhi kinerja SIPKD. Maka perlu adanya perantara antara hubungan tersebut.

Temuan empiris ini diuraikan dari perspektif teori *Stewardship* yang menunjukkan sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen organisasi pemerintah daerah dan hubungan antara pimpinan (kepala bidang perencanaan dan keuangan dan pegawai. Teori ini mencakup konsep bahwa kepala dinas, kepala bagian bertindak sebagai *steward* (pengelola) atas sumber daya dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka oleh pemilik. Dalam konteks iklim komunikasi, teori *Stewardship* dapat digunakan untuk memahami dan membahas efektivitas iklim komunikasi organisasi dengan fokus pada tanggung jawab dan pengelolaan informasi.

Berikut adalah pembahasan tentang bagaimana teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam konteks efektivitas iklim komunikasi terhadap kinerja SIPKD dilihat dari aspek tanggung jawab atas Informasi, teori *Stewardship* menekankan tanggung jawab pimpinan dalam menjaga dan mengelola informasi. Dalam konteks iklim komunikasi, hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi dengan baik, termasuk penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, teori *Stewardship* menekankan pentingnya kepercayaan antara pemilik dan agen. Dalam iklim komunikasi yang efektif, kepercayaan merupakan elemen kunci. Pemangku kepentingan harus merasa bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, jujur, dan dapat dipercaya. Sehingga kepala dinas sebagai *steward* dalam menjalankan pemerintahan pada OPD harus mampu melakukan pengelolaan informasi secara efisien. Hal ini mencakup

distribusi informasi yang tepat waktu, pemantauan penggunaan informasi, dan menyampaikan data yang baik.

Teori *Stewardship* juga menekankan bahwa manajer harus bertindak dalam kepentingan pemilik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Efektivitas iklim komunikasi merupakan informasi yang disampaikan dengan baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pencapaian tujuan organisasi. Teori *Stewardship* mencakup konsep pertanggung jawaban sebagai pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan dapat memperkuat integritas organisasi. Intinya efektivitas iklim komunikasi, ini mengacu pada hubungan yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan perubahan iklim komunikasi yang mungkin terjadi.

### **Pembahasan Pengaruh Langsung Iklim Komunikasi (X) terhadap Implementasi SAP-berbasis Akrua (Z)**

Berdasarkan hasil perhitungan *Bootstrapping uji direct effects* pada tabel 4.1 menunjukkan nilai *P-Value*  $X \rightarrow Z$  signifikan positif sebesar 0,539 dan 0.000 (H1-Terbukti Dan terima- $\rightarrow$  keputusan empiris bahwa Hipotesis kedua ini signifikan berkontribusi 53,9 % iklim komunikasi memberikan efek mempengaruhi dan hubungannya positif secara langsung terhadap Implementasi SAP-berbasis Akrua).

Hasil Analisa hipotesis satu ini secara langsung efektivitas iklim komunikasi signifikan, dan positif membangun model penelitian ini. Berada pada pada konsep komunikasi efektif yang melihat sejauh mana komunikasi dibangun untuk mencapai tujuan organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Iklim komunikasi yang baik dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, pemahaman antar anggota tim, dan terlaksananya program kerja di Pemerintah Daerah.

Pengaruh langsung efektivitas iklim komunikasi terhadap implementasi SAP berbasis akrua yang signifikan berarti bahwa perubahan dalam iklim komunikasi organisasi tidak memiliki dampak yang berarti pada keberhasilan implementasi SAP berbasis akrua. Dalam konteks ini, iklim komunikasi merujuk pada kualitas komunikasi antar individu, tim, dan unit organisasi dalam suatu lingkungan kerja. Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruhnya tidak signifikan tersebut menunjukkan efektivitas iklim komunikasi tidaklah berkontribusi parsial implementasi SAP berbasis akrua di organisasi pemerintah daerah.

Sejalan dengan pembahasan empiris (Widajatun & Kristiastuti<sup>2</sup>, 2020) signifikannya variabel ini hanyalah satu penjelasan yang mungkin berdasarkan informasi yang diberikan. Penting untuk melihat konteks dan sumber informasi yang lebih spesifik untuk memahami lebih lanjut tentang penemuan atau argumen yang mendukung efektivitas iklim komunikasi ini. Sehingga faktor-faktor lain mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam keberhasilan implementasi SAP, seperti pemahaman pengguna atau pegawai bagian perencanaan dan keuangan setiap OPD yang cukup tentang sistem, pelatihan yang memadai, sumber daya yang memadai, dukungan manajemen yang kuat, atau masalah teknis yang muncul selama implementasi SAP berbasis akrua menjadi rekomendasi untuk penelitian mendatang. Temuan ini menunjukkan bahwa entitas pemerintah yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang SAP berbasis akrua.



Pegawai terkait telah memahami dengan baik Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan komunikasi yang intensif mungkin tidak diperlukan, karena sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk mengimplementasikan SAP berbasis akruaI.

### **Pembahasan Pengaruh Langsung Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).**

Berdasarkan hasil perhitungan *Bootstrapping uji direct effects* pada tabel 4.1 menunjukkan nilai *P-Value* ISAP → kinerja SIPKD sebesar  $0,615 > 1,96$  (H3- Terbukti dan diterima). Artinya secara langsung 61,5% kinerja SIPKD dipengaruhi oleh implementasi SAP berbasis akruaI. Hasil analisis penelitian ini sangat logis yang dapat dilihat pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Pentingnya implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI tersebut terkait perhitungan akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan negara dengan segala aktivitas operasionalnya dan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional *accounting* yang mengkhususkan pada masalah pencacatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit yang berkepentingan dengan anggaran pemerintah daerah maupun daerah. Adapun indikator variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penelitian ini merujuk pada instrumen penelitian ini yaitu pemenuhan proses akuntansi (*core job*); kepatuhan penerapan kebijakan SAP-akruaI; Pemenuhan kelengkapan laporan pertanggung jawaban keuangan. Implementasi SAP berbasis akruaI dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi laporan keuangan yang kemudian berguna dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas publik tetapi perlu penyesuaian dengan sistem informasi yang digunakan terutama oleh negara berkembang.

Selain itu implementasi SAP berbasis akruaI secara fakta di sejumlah sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang justru membingungkan para penggunanya. SAP Basis akruaI, seperti basis akuntansi lain, masih rentan untuk dimanipulasi (Ferryono & Sutaryo, 2017) sehingga temuan tidak setuju bahwa basis akruaI menawarkan transparansi yang lebih besar. Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi berbasis akruaI dan pelaporannya mungkin memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima (Aswar, 2020; Anthony Chen James & Lu., 2020; Afiqoh, 2020; BPK, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah, 2021; Jati B. P., 2019; Knudsen., 2020; Azizah & Hidayat, 2023).

Secara umum hasil penelitian ini lebih mendalam menjelaskan secara langsung implementasi SAP berbasis akruaI tidak signifikan dan positif mempengaruhi kinerja SIPKD. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kelemahan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI berdasarkan teori *Stewardship* (pengelolaan) dapat dijelaskan melalui beberapa referensi yang relevan (Pujanira & Taman, 2017). Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip akuntansi akruaI, serta keterampilan dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan berbasis akruaI. Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI juga dapat menghadapi kesulitan dalam peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akruaI (Prastiwi & Mimba, 2018). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akruaI baru diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

## Pembahasan Pengaruh Peran Mediasi

Berdasarkan hasil Analisa hipotesis keempat yaitu menguji pengaruh efektifitas iklim komunikasi terhadap kinerja SIPKD dimediasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua yang dipresentasikan pada tabel 4.2. Hasil Uji *Indirect effects* dan Total *Indirect effects* menunjukkan bahwa hipotesis terkait pengaruh EIK → ISAP → KINERJA SIPKD dengan nilai *P-Value* 0.000 dan 0,332 Keputusan empiris H4 (Terbukti dan diterima *Full Mediation Indirect* (+) Artinya bahwa Implementasi SAP berbasis akrua memberikan efek *Full Mediation* untuk setiap peningkatan satu kesatuan efektifitas Iklim Komunikasi berpengaruh positif 33,2% pada Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut penjelasan empiris menggunakan perspektif teori *Stewardship* terkait peran mediasi penuh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua. Peranya pada iklim komunikasi ini dalam pemerintahan merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SAP akrua memungkinkan pencatatan transaksi keuangan berdasarkan prinsip akrua, yang mencakup pendapatan saat diterima dan biaya saat terutang. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk pelaporan keuangan yang akurat dan informatif.

Hasil empiris terkait pentingnya peran mediasi implemenatisasi SAP berbasis akrua terhadap efektifitas iklim komunikasi dan kinerja SIPKD membuktikan bahwa efektifitas iklim komunikasi dan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara penuh dimediasi oleh implementasi SAP berbasis akrua. Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi membudayakan komunikasi terbuka, partisipatif dan terkini dapat memoderasi pengaruh kinerja SIPKD.]. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi SAP berbasis akrua memiliki peranan dalam mengatur dampak kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Provisinsi Jambi.

Penelitian eksplanasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, seperti hubungan antara SAP berbasis akrua dan efektifitas iklim komunikasi terhadap kinerja SIPKD. Model ini dapat digunakan membantu menjelaskan bagaimana mediasi implemenatisasi SAP berbasis akrua mempengaruhi efektifitas iklim komunikasi dan kinerja SIPKD.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembuktian hipotesis dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian secara langsung iklim komunikasi signifikan dan positif terhadap Implementasi SAP berbasis Akrua, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIPKD. Selain itu implementasi SAP berbasis Akrua signifikan mempengaruhi Kinerja SIPKD. Peran Implementasi SAP berbasis akrua yaitu mediasi penuh (*full mediation*) merupakan kunci kinerja SIPKD merupakan temuan penting dan membedakan dengan penelitian terdahulu.

Selanjutnya, penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membangun system komunikasi yang terintegrasi antar organisasi pemerintah daerah dan tekoneksi dengan pemerintah pusat dalam upaya mensukseskan pelaksanaan SAP berbasis Akrua diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk penelitian yang akan datang pengembangan model penelitian bisa menambahkan variabel eksogen berupa efektifitas kebijakan atau kualitas system serta pengkajian empiris berdasarkan perseptif teori Technology Accepted Model (TAM).

## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada kepala program Studi Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Jambi, Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia, Universitas Pattimura, Ambon, Universitas Negeri Yogyakarta dan Asosiasi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia yang telah berkerjasama untuk melaksanakan program kegiatan *coaching publication* tahun 2023. Semoga pengembangan Ilmu dan Kerjasama ini terus berkelanjutan serta bermafaat untuk masyarakat umum maupun akademisi ataupun praktisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13-26.
- Afiqoh, N. W. (2020). APPLICATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND OBTAINING FAIR OPINIONS WITHOUT EXCEPTIONS. *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol 3 no 2, , 244-259.
- Agustin, H., & Arza, F. I. (2020). Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 230-240.
- Anthony Chen James, J., & Lu., G. (-Y. (2020). The Effect Of Principles-Based Standards On Financial Statement Comparability: The Case Of Sfas. *Advances In Accounting Volume 49*, 100474. <https://doi.org/10.1016/J.Adiac.20>, 142-152.
- Aswar, K. (2020). Assessing the impact of influencing factors on the quality of local government financial statements. *Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA)*, 1-8.
- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja, Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan, Aset Daerah Kota SurabayaA. *Journal of Student Research (JSR)*, 155-175.
- BPK, I. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- BPK, I. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 87-110.
- Chrisman, J. (2019). Stewardship theory: realism, relevance, and family firm governance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, , 1051-1066.
- Cockburn, J., Cundill, G., & Shackleton, S. (2019). Meaning and practice of stewardship in south africa. . *South African Journal of Science*, 115, 115-125.
- Dewi, N. K., Azam, S. M., & Yusoff., S. K. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letter*, 1373-1384.

- Dollah, K. S., & Manossoh, H. (2017). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), , 256–265.
- Fatah, S. N., & Wibowo, P. (2022). Ada Apa Dengan Faktor Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta? *Jurnal Ilmiah Akuntansi -JIAFE*, 23-32.
- Ferryono, B., & Sutaryo, S. (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrua! dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrua! dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Business Dynamics*, 143-160.
- Handayani, P., Rispantyo, R., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada opd kabupaten sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), , 270-279. .
- Hasan, A. ., Setiawan, L., & Cahyono, C. (2022). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan pada sekretariat daerah kabupaten pangkep. Indonesia. *Journal of Business and Management*, 133-140.
- Hasanah, J., & Amal, M. (2020). Determinants of financial performance of regional government revenue growth in central java province, indonesia. . *Kne Social Sciences.* , 14-23.
- Hermawansyah, A., Aditya, P. H., & Susi, F. (2022). Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Di Kantor Ketahanan Pangan, Penajam Paser Utara Menggunakan Kerangka Cobit 5;. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 54-66.
- Holle, V., Salle, A., & Sanggenafa, M. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua!, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada organisasi perangkat daerah provinsi papua. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14-23.
- Jantong, A. (2017). Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Matra Pembaruan 1 (2)* , 109-119.
- Jati, B. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua! terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Wahana . *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1-14.
- Knudsen., D.-R. (2020). Elusive Boundaries, Power Relations, And Knowledge Production: A Sistematic Review Of The Literature On Digitalization In Accounting. . *International Journal Of Accounting Information Sitems* 36 , 345-358.
- Kurniawan, Y., & Yuswanto. (2016). Pengembangan Program Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua! Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 40-48.

- Maulana, Y. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*. Vol.10, No . 2 , 1 4 9 - 1 6 0.
- Metcalfe, A. (2023, February). <https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/new-meet-the-team/alex-metcalfe.html>. Retrieved from accaglobal.com: <https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/new-meet-the-team/alex-metcalfe.html>
- N, M. M., & L, S. (2021). Evaluasi Implementasi Metode Pencatatan Basis Akruar Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah . *EXPLORE*, 38-50.
- Novianti, I., Syamsidar, & Syawalina<sup>3</sup>, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar . *Balance Vol. Xv No. 1* , 18-32.
- Prastiwi, N., & Mimba, N. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akruar pada kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi* , 1178.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. . *Nominal Barometer Riset*, 62-82.
- Rachmawati, E., Hurriyati, R., & Dewi Dirgantari, P. (2020). E-Promosi untuk Komunikasi pelanggan di Sektor Minuman: Studi Kopi Kenangan. . *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2360>, 38–247.
- Rosana, L., & Bharata, R. ( 2023). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akruar terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. . *Jurnalku*, 3(1),, 23-34. .
- Sa'diyah, D. I., & Yuhertiana, I. .. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar(Studi Pada Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi AkuntanSI*, Vol. 14, No. 1, 126 - 141.
- Subadriyah, S. (2017). Flypaper effect: sebelum dan sesudah penerapan standar akuntansi pemerintah akruar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 65-76.
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar. *EQU*, 89-92.
- Subhi, G., & Yuhertiana, I. (2021). Peran sdm dan teknologi informasi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruar. *Equity*, 24(2),, 141-156. .
- Subhi, G., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan teknologi informasi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruar. . *Equity*, 24(2), 141-156. .
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 05, No. 01, 1-13.

- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabet.
- Suharyadi., & Purwanto. (2007). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta:: Penerbit Salemba Empat.
- Suryaningrat, A. M., & Utama, I. M. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 23 No. 1, Februari 2018., 129-139.
- Tobing, D. L. (2021). *Disajikan Sesuai Standar Akuntansi, Bpk Berikan Opini Wtp Pada Lk Kementerian Perindustrian*. Jakarta: <https://www.bpk.go.id/news>.
- Velte, P. (2020). Corporate social responsibility and earnings management: a literature review. . *Corporate Ownership and Control*, 17(2), 8019.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti2, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *bircu-journal.*, 30-42.
- Wulandari, S. M., Nugroho, E., & Ambarriani, S. (2017). Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (Sipkd) Di Blud Rsud Meuraxa. *Journal of Information Systems for Public Health*, Vol. 2, No. 1, 13-20.
- Yafie, M. D. (2013). Penerapan Basis Akrual pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. . *Ejournal.unesa.ac.id. volume 2 nomer 1*, 40-51.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati2, I. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Business Perspective*, 96-106.